

Baliseering

Maka, dipilahlah sejumlah ekspresi budaya yang awalnya hanya satu bagian dari keseluruhan ritual kehidupan sehari-hari menjadi komoditi. Kemudian, diseleksi pula beberapa bentuk kesenian yang diceraht dari konteks kelahirannya, dipoles dengan warna yang lebih sesuai dengan selera turis, dan diberi label barga.
(Alit Ambara)

Kutipan kalimat diatas, sekedar ingin memberikan ilustrasi kepada kita semua, bahwa betapa selama ini Pulau Bali telah “dijajah”. Mahasiswa yang dibesarkan oleh tradisi Marxisme klasik akan membaca wacana “penjajahan” Bali sebagai akibat dari kapitalisme global. Sedangkan kalangan yang kental nuansa post-strukturalis, akan memakai arkeologi dan geneologi pengetahuan sebagai pisau analisisnya untuk menguak wacana “penjajahan” itu. Maka, pertanyaan yang layak untuk diajukan adalah, bagaimana “penjajahan” Bali terjadi? Pembacaan model apakah yang dapat menjelaskannya dan bagaimana tanggapan institusi perguruan tinggi (termasuk didalamnya mahasiswa) membaca realitas ini?

Bali Otentik

Jika saat ini kita sering mendengarkan upaya melestarikan kebudayaan Bali, itu bukanlah hal baru. Pada masa penjajahan, pemerintah kolonial Belanda sudah melihat potensi Pulau Bali yang dapat meningkatkan pendapatan mereka, potensi itu tentunya adalah pariwisata. Maka, dibentuklah instrumen-instrumen pendukung proyek pariwisata. Pertama-tama ialah dengan mendatangkan antropolog-antropolog untuk memproduksi pengetahuan tentang “the native” (orang lokal). Van Bloemen Wander dan Ruger van Eck adalah beberapa diantara antropolog – ketika itu disebut sebagai etnolog – generasi pertama yang datang ke Bali. Mereka merupakan bagian dari aparaturn pemerintah kolonial yang bertugas untuk memahami gambaran tentang Bali yang pada waktu itu adalah tempat huni manusia liar yang suka perang, pemberontak, penuh misteri dan mistis, yang sekaligus eksotik.¹ Dengan perangkat pengetahuan yang dimilikinya, para etnolog itu ingin menguak Timur (Bali), karena itulah mereka juga disebut sebagai Orientalis.

Pengetahuan tentang Bali penting untuk diperoleh, karena dengan begitu Belanda dapat memahami konstruk sosial dan budaya masyarakat Bali. Kebudayaan yang telah dipelajari itu kemudian disortir menurut selera Belanda. Melalui alat-alat produksi budaya atau yang biasa disebut sebagai rezim kebenaran, mereka menentukan ekspresi budaya yang dapat berkembang dan yang tidak. Tujuan akhirnya tidak lain untuk penciptaan kembali – jika tidak ingin disebut pengontrolan – kebudayaan Bali

Judul tulisan ini pun, mengambil istilah yang pernah digunakan oleh Belanda sekitar tahun 1920-an tentang kebijakan penciptaan kembali – *re-creating* – Bali. Ketika itu, pemerintah kolonial mendirikan *Bali instituut* yang bertugas untuk mengkaji dan mengusulkan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan terhadap Bali. Salah satu produk kebijakan yang terkenal ialah sosialisasi ide “Bali otentik” atau lebih dikenal dengan *Baliseering* kepada masyarakat Bali sendiri. *Baliseering* dilakukan melalui pengajaran bahasa, kesusasteraan dan seni tradisional kepada kaum muda Bali, supaya mereka sadar akan

¹ Lihat Degung Santikarma, *Bali, Kapling para Antropolog*, sisipan Media Kerja Budaya edisi 05/2001, hal. 5

kekayaan budayanya.² Saking ngototnya Belanda “mempertahankan” budaya Bali, pada Bulan Desember 1922, mereka sempat mengusir dua pasang suami istreri, Richard Van Klaveren dan Cornelis E. Croesbeek dari pulau Bali. Alasan pengusiran itu apa lagi kalau bukan karena Belanda takut kegiatan Richard dan Cornelis yang baru 21 bulan memberitakan Injil di Bali dapat merusak kebudayaan Bali. Ada kepentingan pragmatis dan politis-strategis di balik kebijakan *Baliseering* atau *The Balinization of Bali* ini. Di satu sisi Belanda dapat terus mempertebal koceknya dari turis yang ingin menyaksikan “keaslian” Bali. Di sisi yang lain Belanda dapat mempertahankan kekuasaan atas Bali dengan menjaga, merawat dan melindungi budaya dan tradisi Bali dari pengaruh luar. Apakah itu Islamisasi, Kristenisasi atau modernisasi, supaya ia mudah dikendalikan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin potensinya. Singkat kata, untuk melanggengkan kekuasaan, Belanda tidak perlu memakai kekuatan fisiknya, cukup dengan menciptakan wacana (*Baliseering*) dan mendistribusikan melalui alat produksi budaya dan otoritas pencipta kebenaran, seperti *Bali instituut* tadi, para antropolog, pemerintah kolonial Belanda, media (ketika itu koran dan iklan), sekolah dan mungkin juga agama.

Instrumentalisasi yang dilakukan Belanda dalam rangka *re-creating* Bali tidak hanya berhenti disitu. Idiom-idiom-pun diciptakan untuk menggambarkan keindahan, kemolekan, keaslian dan kemistisan Bali. Kalau Indonesia dipromosikan Belanda dengan istilah *indie mooy*, yang berarti Indonesia molek, sedangkan Jawa disebut sebagai *‘the mecca for the tourist’*. Maka untuk Bali diciptakan kiasan ‘Pulau Dewata’, yang dipopulerkan oleh brosur maskapai dagang kerajaan Belanda, KPM (*koninklijke Paketvaart Maatschappij*) pada tahun 1914. Penggunaan kiasan ‘Pulau Dewata’ merupakan strategi Belanda untuk merepresentasikan realitas melalui penggunaan simbol-simbol bahasa tertentu. Dalam kasus ini, bahasa dipahami sebagai salah satu manifestasi dunia simbolik yang paling mudah dipahami. Karena keistimewaannya pula, memungkinkan bahasa menjadi mudah dimanipulasi. Artinya bahasa tidaklah netral, bahasa tidak hanya digunakan untuk menerangkan realitas, namun juga alat untuk menciptakan realitas. Begitu pula dengan idiom ‘Pulau Dewata’ yang tidak hanya menjelaskan realitas, akan tetapi turut pula dalam upaya menciptakan, menjaga dan merawat realitas. Persis seperti kasus *Bali instituut* dan para antropolog, Belanda melalui iklan pariwisata turut mem-Bali-kan Bali.

Institusionalisasi Budaya

Sementara itu untuk melegalkan penggunaan budaya Bali sebagai tameng kekuasaan, pemerintah kolonial Belanda menggandeng kaum ningrat Bali. Dibungkus dengan politik etis, Belanda menciptakan kelas priyayi berpendidikan – persis seperti di Jawa – untuk ditempatkan sebagai pamong praja. Ironis, politik etis yang seharusnya mencerahkan hanyalah kemasan luar. Kolonialisme Belanda kini bertransformasi, penjajahan itu berwajah lebih manis dan bersahabat agar proyek eksploitasi bisa berjalan tanpa gangguan yang berarti. Bersama dengan kaum ningrat, Belanda menciptakan sistem “kasta” untuk menjamin kesetiaan kaum ningrat.³

Kemudian gelombang modernitas itu datang. Kalau di Pulau Jawa, lahir gerakan keagamaan modern, Muhammadiyah. Maka di Bali ada gerakan *Surya Kanta*, yang lahir tahun 1925 di Singaraja. Gerakan ini hampir mirip dengan semangat gerakan keagamaan modern lainnya, yaitu rasionalisasi agama, bahkan dalam tujuan gerakannya mereka menyatakan “mengadakan pembaharuan dalam masyarakat sesuai dengan kemajuan jaman”. Salah satu kritik dari gerakan radikal ini ialah sistem kasta, yang menurut mereka

² Baca Alit Ambara, *Proyek Kolonial Bank Dunia, mem-Bali-kan Bali*, sisipan Media Kerja Budaya edisi 05/2001, halaman 8

³ Deskripsi yang lebih lengkap dan menarik mengenai penciptaan “kasta” ini lebih lanjut baca A.A. GN. Ari Dwipayana, *Kelas Kasta, Pergelutan Kelas Menengah Bali*, Lapera Pustaka Utama Yogyakarta, 2001.

adalah konstruksi budaya yang feodalistik dan pro *establishment*. Melalui buletin yang mereka terbitkan secara berkala, perkumpulan yang semua anggotanya berasal dari kalangan jabawangsa ini menyampaikan kritik terhadap sistem kasta dalam masyarakat Bali dengan cerdas. Mereka juga tidak ragu mengutip lontar seperti Adiparwa, Sarasamuscaya, Widi Papinjatan dan Werti Sesana dalam mendukung argumentasinya. Gerakan *Surya Kanta* yang progresif jelas membuat pemerintah Belanda kebakaran jenggot. Dari kaca mata Belanda, gerakan *Surya Kanta* dapat membuat instabilitas di daerah koloni mereka. Asumsi Belanda ialah gerakan seperti itu dapat merubah konstruk sosial dan budaya Bali, jika perubahan itu membuat ke-“asli”-an Bali hilang, pasti akan menyebabkan menurunnya jumlah turis yang datang. Apalagi, seperti yang diketahui *Surya Kanta* juga menganjurkan penyederhanaan prosesi upacara keagamaan seperti ngaben. Jelas Belanda tidak akan suka itu. Bagi Belanda pemangkasan bentuk ritual keagamaan Hindu di Bali (seperti yang dianjurkan oleh *Surya Kanta*) sama dengan memangkas jumlah wisatawan yang datang ke Bali.

Hantaman badai modernitas di Bali, tidak hanya membuat Belanda prihatin namun juga para antropolog dan peneliti yang tertarik mencari obat untuk menyembuhkan masyarakat Amerika yang tenggelam dalam gaya hidup modern. Para antropolog gelombang kedua ini berbondong-bondong pergi Timur, dimana menurut mereka kearifan budaya dan kekayaan spiritual masih tertancap dengan kuat di dalam hati sanubari masyarakatnya. Jean Belo, Margaret Mead dan Gregory Bateson adalah beberapa diantaranya yang datang ke Bali, pada era 1930-an. Berbeda dengan pendahulunya yang Orientalis, peneliti yang datang belakangan ini tidak lagi melihat Timur sebagai kebiadaban yang harus diberadabkan. Mereka malah melihat Timur (Bali maksudnya) sebagai surga spiritual, bertolak belakang dengan Barat yang wajahnya carut marut. Bali adalah tempat dimana keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan tuhan terpelihara. Berangkat dari kesadaran ini, mereka merasa perlu mengemban tugas suci untuk menyelamatkan Bali dari kepunahan, melestarikan kekhasan dan keaslian kebudayaan Bali dari hantaman arus modernisasi dan pengaruh Barat, atau biasa disebut dengan *salvaging the premodern*.⁴ Sejak periode tersebut kaum intelektual dan seniman dari Eropa dan Amerika mendirikan berbagai institusi yang mengatasnamakan pelestarian budaya dan pengembangan kesenian Bali.

Rudolf Bonet dan Walter Spies termasuk diantaranya. Bersama dengan Cokorda Gde Agung Sukawati mereka mendirikan Pita maha, institusi yang merubah cara pandang berkesenian masyarakat Bali secara radikal. Bahkan Walter Spies turut serta dalam penciptaan dan pengembangan Tari Kecak. Bersama-sama pemerintah kolonial Belanda mereka inilah yang memperkenalkan Bali sebagai “surga di Bumi” tempat jiwa yang sakit akibat industrialisasi bisa disembuhkan. Istilah *The Paradise Island* sendiri dipopulerkan oleh Hickman Powell, seorang novelist pada tahun 1930. Sejak saat itulah di Bali mulai terjadi apa yang disebut sebagai institusionalisasi budaya, bukan saja oleh pemerintah kolonial namun juga oleh institusi-institusi swasta. Maka perlawanan kultural seperti yang dilakukan perkumpulan *Surya Kanta* oleh Belanda dianggap sabotase terhadap proyek “pengkeramatan” budaya Bali untuk diperdagangkan. Sedangkan bagi kaum intelektual, peneliti dan seniman asing, perlawanan kultural tersebut dibaca sebagai penyimpangan perilaku budaya dari “asli”-nya.

Seleksi Budaya

Adalah Soekarno yang berusaha untuk menghidupkan kembali turisme di Bali setelah Belanda henggang dari Indonesia. Namun tarik menarik kepentingan dan

⁴ Degung Santikarma, *Op., Cit.*, halaman 5

kekacauan politik dalam negeri selama kekuasaannya, membuat proyek tersebut tidak pernah terealisasi.

Naiknya Soeharto menggantikan Soekarno membuat Bali kembali masuk ke dalam “kerangkeng”. Keindahan alam, keunikan adat-istiadat dan keseniannya dijadikan “etalase” Indonesia. Kali ini bukan kolonialisme dengan muka sangar dan senjata laras panjang di tangan yang menghisap Bali, namun kolonialisme berwajah baru dengan senyum di bibir dan segepok uang di tas. Melalui pintu masuk Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) 1967 dan sebuah Keppres di tahun 1972 mengenai rencana induk pariwisata Bali, mereka kembali ke pulau ini, berebut sebidang tanah di Kuta, Nusa Dua, Sanur, Ubud dan banyak lagi. Lalu dimulailah apa yang disebut sebagai invensi atau proses penciptaan dan pembakuan budaya.⁵

Datangnya pemodal ke Bali, tentu membawa kepentingan dibalik dompetnya. Sudah menjadi watak dasar kapitalisme, untuk melipatgandakan uang dalam waktu yang singkat. Begitu pula dengan para investor itu, setelah berhasil menguasai tanah di Kuta, Nusa Dua dan tempat lainnya, kini mereka mulai menjual apa saja yang dikenal sebagai Bali. Mulai dari keindahan alamnya, sampai keunikan budaya Bali – yang mereka sebut sebagai museum hidup. Kepentingan pemilik modal inilah yang memaksa Bali untuk menyortir dirinya sendiri, apa budaya yang “asli” dan apa yang bukan, apa yang layak untuk disuguhkan dan apa yang harus dimodifikasi untuk kemudian layak disuguhkan kepada turis. Proses seleksi ini dilakukan demi terpuaskannya impian penikmat Bali (turis), yang harus diyakinkan ketika mereka datang ke Bali yang mereka lihat adalah Bali yang sesungguhnya. Bahwa tarian, lukisan, ukiran dan seluruh ruang baik itu ruang fisik maupun ruang ekspresi di Bali adalah original Bali. Maka tidak heran jika perhelatan budaya semacam “mendobrak hegemoni”-nya Kamasra STSI mendapat caci maki., sedangkan Pesta Kebudayaan Bali memperoleh respon yang sebaliknya. Lebih menyedihkan lagi ada intelektual Unud yang mengatakan demonstrasi – sebagai sebuah ekspresi budaya – bukanlah budaya Bali. Tiga contoh peristiwa budaya diatas, setidaknya dapat dijadikan barometer bagi para akademisi, seniman, intelektual maupun birokrat Bali bahwa saat ini secara sadar maupun tidak *cultural screening* itu terjadi dan terus bekerja melalui berbagai alat-alat produksi kebudayaan atau rezim kebenaran. Bahwa kebebasan berekspresi di Pulau Bali mulai dibatasi dan diseragamkan. Kalau sudah begitu apa bedanya dengan Orde Baru.

Komoditisasi Budaya

Kolaborasi antara birokrasi dan pemilik modal menyebabkan seluruh potensi dan energi masyarakat Bali tersedot ke industri pariwisata paska 1970-an. Pariwisata budaya yang menjadi andalan Bali mau tidak mau mendegradasikan makna kata budaya itu sendiri. Bagaimana tidak, ekspresi budaya yang tak terhitung jumlahnya, demi kepentingan pariwisata harus dibatasi dalam bentuk tarian dan benda seni saja. Kesenian yang semula adalah aktualisasi dari motivasi spiritual dalam kebudayaan masyarakat Bali sebagai tendensinya, menjadi tercerabut dari motivasi asli itu. Dahulu masyarakat Bali memahami seni sebagai wujud bakti dan persembahan untuk Ida Sang Hyang Widhi Wasa, berkesenian adalah juga untuk mengekspresikan dirinya, dengan totalitas dan seluruh konsentrasi bahkan diiringi dengan ritual dan doa, seperti pada pembuatan Keris

⁵ sebagai perbandingan, dalam sejarah Islam invensi tradisi terjadi pada masa dinasti Abbasiyah kurang lebih 754 M. Ketika Ibn Muqaffa memindahkan arena perang antar faksi dalam tubuh Islam dari pertempuran fisik ke wilayah kebudayaan dan pemikiran melalui teknologi disiplin (siyasah al-nafs dan siyasah al-madinah) yang menundukkan mental dan pikiran umat Islam. Sejak saat itulah terjadi sakralisasi atas hal-hal yang sifatnya duniawi. Sehingga tidak heran jika doktrin penyatuan agama dan negara dalam Islam lahir dari optik siyasah al-nafs dan siyasah al-madinah tersebut. Lebih lengkapnya, baca, Ahmad Baso, *Islam dan Invensi Tradisi*, Majalah Budaya Desantara, edisi 01, Depok, 2001.

dan keperluan upacara.⁶ Kini mereka membuat benda-benda seni dan sakral seperti memproduksi barang di pabrik, dibuat secara massif dengan standar tertentu untuk harga tertentu. Begitu pula nasibnya dengan tarian ritual, ia harus dipermak sedemikian rupa, sehingga durasinya bisa dikompromikan dengan keinginan turis.

Para seniman yang tercerabut dari akar motivasinya, dalam bahasa Karl Marx teralienasi atau terasing dari ruh-nya. Mereka telah dirampok esensi hidupnya, dan terbiasa dengan pola kapitalistik dimana tujuan utamanya ialah uang, dan bukan barang (benda seni) yang diproduksi. Barang dalam semangat kapitalisme hanyalah sarana untuk memperoleh uang. Perubahan paradigma itu yang kemudian mengeksploitasi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Bali baik disadari maupun tanpa disadari. Seniman dari kacamata kapitalisme ini tak ada bedanya dengan buruh di pabrik. Mereka sama-sama bekerja demi uang, uang dan uang. Ukiran, patung, cincin perak dan benda kerajinan lainnya diproduksi demi terpenuhinya nilai tukar, benda-benda itu akhirnya menjadi komoditi, ketika ia memiliki nilai guna bagi pembelinya. Turis yang datang ke Bali akan menukar nilai sebuah benda seni dengan sejumlah uang, sebagai gantinya benda seni itu memberikan kebutuhan dan hasrat yang diinginkan oleh turis tersebut. Begitulah perjalanan hidup, benda seni yang telah bertransformasi menjadi komoditas di mata para pemilik modal.

Selain komersialisasi, seni juga mengalami pembengkokan yang hebat. Kesenian sebagai salah satu ekspresi budaya yang telah menjadi komoditas memaksa dirinya sendiri untuk membongkar nilai-nilai etis, diantaranya ialah mitologis, spiritualitas dan simbolik. Profanisasi atau menguapnya nilai-nilai etis tersebut tidak lebih sekedar alibi yang ingin menutup-nutupi sekaligus menunjukkan kebangkrutan kesenian di tangan komoditi. Proses desakralisasi seni memberikan kesempatan kepadanya untuk menyimpang dari nilai-nilai tertentu yang normal (nilai etis tentunya). Ketika ia tercerabut dari identitas etis dan moralitas, maka terjadilah distorsi seperti pengaburan, pembengkokan, penopengan dan pembajakan identitas atau disebut sebagai perversi. Dalam bahasa kapitalisme perversi seni ini diberi merk inovasi atau pengembangan.⁷

Fenomena diatas merupakan konsekuensi logis dari adanya motivasi baru di luar motivasi spiritual, yaitu motivasi komersial. Pada wilayah seni tari, penghayatan yang dalam dari berkesenian terdangkalkan, emosi yang kuat dan sukarela dari pelakunya menjadi lemah dan tendensius serta rangkaian gerak yang dilakukan hanya dimaksudkan untuk mendapatkan upah yang harus dibayar oleh turis. Tari-tarian dan tetabuhan yang dalam kondisi aslinya hanya dipertunjukkan menurut syarat-syarat waktu, tempat dan suasana tertentu, kemudian dilakukan atas pesanan dari pasar. Konsekuensi dari orientasi yang kental nuansa komersil ini, melahirkan perversi (inovasi??) terhadap karya seni yang sudah ada agar sesuai dengan kehendak pasar (turis). Akhirnya seni yang pada awalnya lekat dengan tradisi dan budaya masyarakat kini diangkut ke hotel-hotel atau pusat-pusat pertunjukan demi kepentingan komersil. Sementara itu sanggar-sanggar tari di pedesaan tidak lagi berfungsi sebagai tempat belajar menjadi penari yang baik, tetapi berfungsi sebagai pusat latihan menjadi penari hotel. Sanggar-sanggar itu pada *High Season* terlihat mengirimkan gadis dan pemuda cilik untuk menari dari satu hotel ke hotel yang lain. Bahkan STSI terjebak dalam produksi tari-tari lepas ringan yang populer sesaat dan

⁶ I Nguhur Suryawan, *Membongkar Habis Sejarah Seni Rupa Bali*, www.detik.com/kampus/gagasan/

⁷ Menarik dicermati, saat ini *kapitalisasi* seni juga mewabah Islam. Salah satunya ialah komersialisasi puji-pujian yang dikasetkan dan ditayangkan di televisi. Menurut Agus M. Surur, hal itu dapat dikategorikan sebagai perversi seni tradisi Islam. Hebatnya, A. Mun'im D. Z. menemukan bahwa sentimen keagamaan yang dikomersilkan itu mampu membuat sebuah Bank swasta yang sebelumnya tidak dikenal, dibanjiri oleh deposan setelah Bank itu menayangkan iklan shalawat *Badar*. Periksa, Agus Miftahus Surur, *berdagang sembahyang, komersialisasi tradisi dan ambruknya otentisitas*, dan Abdul Mun'im D. Z., *Komersialisasi Tradisi "Pujian"*, Jurnal Gerbang Vol. 7 No. 3, Surabaya, 2000.

setelah itu dilupakan selamanya.⁸ Ilustrasi diatas setidaknya dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana proses komoditisasi budaya terjadi di Bali.

Invensi dan Disiplin

Setelah *screening* dan komoditisasi budaya maka proses itu bermuara pada invensi budaya atau diberikannya stempel legitimasi bagi ekspresi-ekspresi budaya terpilih untuk tetap hidup (dan berkembang??) oleh rezim-rezim kebenaran. Seperti pemerintah, militer, sekolah, universitas, studio lukis, galeri, media massa bahkan keluarga. Sejarah selalu menunjukkan, bahwa kolaborasi birokrasi dan pemilik modal selalu melihat kesenian dan kebudayaan sebagai produk dan bukan sebagai produksi. Disinilah peran aktif birokrasi sebagai salah satu rezim kebenaran dalam hal mendisiplinkan tubuh sosial masyarakat dengan memilah, mengkemas, memampatkan dan kemudian mempromosikan dalam bentuk “produk”. Melalui instrumen perda No. 3 tahun 1974 tentang konsep pariwisata budaya sebagai identitas pariwisata daerah Bali, produk-produk pariwisata turunan dari Perda itu ialah Kuta bagi turis yang pas-pasan, Sanur untuk yang menengah, Nusa Dua tentunya disediakan untuk kalangan turis ningrat dan Ubud bagi yang ingin bercengkrama dengan keindahan alam atau mungkin bagi turis yang ingin menikmati layanan mutakhir pariwisata, *spiritual tourism*. Sementara itu kita juga pernah mendengar slogan “*visit Indonesian Year*” atau yang paling gress ialah pencanangan Denpasar sebagai kota budaya, lengkap dengan konsep *city tourism*-nya. Hampir seluruh paket pariwisata diatas menjadikan budaya sebagai ujung tombaknya. Dan untuk menjamin kenikmatan berpariwisata budaya, regulasi-regulasi harus dikeluarkan untuk menjaga ke-“asli”-annya, untuk mengontrolnya dari ekspresi budaya yang berbeda, untuk mendisiplinkannya dari berbagai “pencemaran”.⁹

Pada tahun 1970-an Foucault, seorang filsuf Post-Modernisme Prancis, menemukan korelasi antara *power* dan *knowledge*. Dalam bukunya yang fenomenal *The Archaeology of Knowledge* dan *Discipline and Punish*, ia menceritakan bahwa antara pengetahuan dan kuasa terdapat relasi saling memperkembangkan. Artinya, tidak ada praktek kuasa yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak mengandung relasi kuasa. Sebagai contoh, birokrat dalam perspektif Foucault melakukan praktek ini terhadap tubuh masyarakat. Ketika konsep *Culture Tourism* disosialisasikan, pada saat yang bersamaan pengetahuan tersebut memposisikan dirinya sebagai norma dan bahkan moralitas sekaligus bagi praktek ber-kuasa. Mengkritik praktek ber-kuasa berarti mengkritik pengetahuan, dan mengkritik pengetahuan berarti mengkritik kebenaran, dan itu artinya “kebodohan”, “kesesatan”, “anomali”, dan juga “kegilaan”.

Sedangkan disiplin digambarkan Foucault yang homoseks itu, ibarat disiplin militer, yang menekankan ketundukan fisik, dengan tujuan mengoptimalkan potensi tubuh. Pada disiplin sebagai mekanisme *power* yang diharapkan adalah relasi ketundukan dan kebermanfaatannya itu. Relasi seperti ini sangat menentukan – seperti – bagaimana seseorang bisa menguasai tubuh orang lain, bukan hanya untuk menuruti apa yang diinginkannya, melainkan juga supaya mereka berperilaku sebagaimana yang dikehendaki sesuai dengan teknik-teknik, ukuran-ukuran kecepatan dan efisiensi yang sudah

⁸ Baca Agung Putri, “*Pulau Dewata*” *Surga Bagi Investor*, sisipan Media Kerja Budaya edisi 05/2001, halaman 3, namun saya salut atas upaya kawan-kawan Kamasra STSI untuk *mendobrak hegemoni*, kegiatan melawan seperti itu harusnya juga diikuti oleh kami di Fakultas Teknik. Namun sayang, kami sepertinya sudah enggan untuk merdeka. Kami seperti sudah puas oleh bongkahan-bongkahan beton, setrum listrik, mesin-mesin robot dan nalar estetika normatif-instrumental kami.

⁹ Periksa South China Morning Post, *The Trouble With Bali*, 15 Juli 2001. Dalam wawancara itu terlihat keinginan yang sangat kuat dari pihak birokrasi untuk memurnikan kebudayaan Bali yang menurut mereka mulai tercemar.

ditentukan sebelumnya. Yang muncul kemudian adalah tubuh-tubuh yang – di satu sisi – kekuatannya ditingkatkan, dalam arti dimanfaatkan dan didayagunakan secara ekonomis, namun juga – pada sisi yang lain – dikurangi atau diperlemah, dalam arti ditundukkan secara politis (bisa dikontrol). Mekanisme dan teknik disiplin bisa berupa penyeragaman, normalisasi, manipulasi, *conditioning*, pengadministrasian, pengaturan, penataan, “pengasastunggalan”, kontrol, pengawasan, pengarahan, penataran, dan juga penundukan dan individualisasi.¹⁰ Begitu pula yang terjadi dengan praktek disiplin dari jajaran birokrasi atau rezim kebenaran ini, di satu sisi mereka melatih tubuh masyarakat agar meningkatkan ekonominya disisi yang lain masyarakat harus dikontrol, kebudayaan diseragamkan dan diadministrasikan atau yang dikenal dengan birokratisasi budaya, agar tujuan tersebut tercapai.

Perguruan Tinggi dan Disiplin

Dalam hal invensi budaya, institusi perguruan tinggi tidak mau kalah ikut berpartisipasi memapankan, meng-administrasi-kan dan membakukan budaya. Apalagi golongan (yang katanya) intelektual dan akademisi ini dilengkapi dengan amunisi dan peralatan perang canggih. Mulai dari perangkat pikiran yang mampu membaca realitas sosial, menganalisa, membuat solusi sampai aplikasinya atau teknologi disiplin. Universitas Udayana sebagai salah satu institusi perguruan tinggi di Bali dalam bacaan saya ikut menyediakan sekrup-sekrup bagi mesin raksasa kapitalisme yang saat ini tengah menghisap Bali. Melalui proyek megah berjudul Kuliah Kerja Nyata Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (KKN Sibermas), mahasiswa disusupkan ke desa-desa. Mereka disuruh untuk mendata dan menginventarisasi potensi desa untuk kemudian dianalisa dan direkomendasikan berbagai alternatif solusi yang dapat mengangkat taraf hidup dan derajat warga desa itu dalam bentuk proposal. Kalau saja kita mau kritis, bagaimana jika proposal-proposal yang jumlahnya ratusan itu dimanfaatkan oleh pemilik modal, kemudian dibaca layaknya peta strategi penyerbuan ala militer. Tidakkah terpikirkan oleh kita, suatu saat nanti sebuah proposal KKN dapat merubah nasib sebuah desa kering dan gersang di pesisir Buleleng, yang disulap menjadi salah satu tujuan wisata (entah dengan konsep pariwisata seperti apa) dengan berpuluh-puluh hotel berbintang dan berbagai layanannya. Kalau hal itu sudah terjadi, ramai-ramai pencinta lingkungan berteriak, “jaga ekosistem”, mahasiswa berdemo gara-gara lahan rakyat dicaplok seenaknya, birokrat kewalahan dengan urusan kependudukan dan pemerhati Bali prihatin Bali semakin sumpek.

Pola KKN Sibermas sangat mirip dengan jaman penjajahan dulu. Yakni, adanya korelasi antara “kehendak untuk mengetahui” dan “kehendak untuk berkuasa”. Ini tampak jelas lagi dalam kasus Orientalisme, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kehendak untuk mengetahui Timur, seluk-beluknya, masyarakatnya, masa lalu dan juga memperkirakan nasib masa depannya, adalah sekaligus juga berarti kehendak untuk menguasainya. Dan kuasa atas Timur ini pada gilirannya juga berkorelasi dengan fenomena menumpuknya studi-studi tentang dunia Timur yang kemudian melahirkan disiplin “*Orientalism*”. Singkatnya, kata Foucault, “*its fate is to be redefined by knowledge*”. Begitu pula dengan KKN (baik yang konvensional atau model Sibermas), ia menciptakan sebuah disiplin baru yang berfungsi menguak “misteri” keterbelakangan masyarakat desa, membacanya dan kemudian menginjeksi virus “pemberdayaan” itu ke desa.

Desa dalam pandangan institusi perguruan tinggi ekuivalen dengan Timur dalam kacamata Barat. Keterbelakangan/kemelaratan yang menjadi bacaan kalangan akademisi sama dengan kebiadaban yang dilihat oleh Orientalisme. Maka pemberdayaan yang

¹⁰ Ahmad Baso, *Militerisasi Islam, Kritik Nalar Politik Islam Sebagai Kritik Kebenaran*, tidak dipublikasikan.

menjadi agenda utama Universitas tidak ada bedanya dengan pem-beradab-an atau *civilized* yang menjadi tugas penjajah. Maka, jika Orientalisme menjadi sebuah disiplin yang memiliki kemampuan membaca Timur, lalu melalui pengetahuan tentang Timur yang dimilikinya dipakai untuk menguasai, mengontrol dan merawat kekuasaan penjajah atas Timur. Dengan logika yang sama pula, pendisiplinan masyarakat desa terjadi melalui KKN. Dari titik inilah invensi budaya oleh perguruan tinggi terjadi.

Tidak sedikit dari berbagai proposal KKN Sibermas yang mengusung tema pariwisata sebagai jawaban atas pertanyaan, bagaimana memberdayakan desa. Beberapa varian yang ditawarkan mahasiswa ialah, *eco-tourism*, *agricultural tourism*, *spiritual tourism*, *cultural tourism*, *ethnic tourism* dan *tourism-tourism* lainnya. Permasalahannya, apakah tawaran mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Jawaban pertanyaan itu mungkin sama dengan jawaban pertanyaan, apakah kebijakan *Baliseering* merupakan kebutuhan masyarakat Bali. Jika jawabannya tidak, KKN tidak ubahnya seperti *Bali Instituut*, yang kepanjangan alat kekuasaan sekaligus rezim kebenaran yang berniat untuk meng-*create* Bali sesuai dengan keinginan dan impiannya. Kalau jawaban masyarakat benar-benar membutuhkan daerahnya dijadikan situs wisata, kita patut curiga, jangan-jangan kekhawatiran sebagian budayawan Bali bahwa *cultural tourism* bertransformasi menjadi *tourism culture* dalam masyarakat Bali menjadi kenyataan.

Ada sebuah fenomena menarik, ternyata bukan hanya mahasiswa yang mendominasi kerja dalam wilayah produksi nalar budaya. Fakultas Teknik-pun secara institusional terlibat dalam proyek besar ini. Bersama-sama Pemerintah Kodya Denpasar dan Dinas Pariwisata Kodya Denpasar, Laboratorium Perumahan dan Pemukiman Program Studi Arsitektur Universitas Udayana merancang konsep *Urban Village* dengan pendekatan pembangunan berwawasan budaya untuk desa disekitar Kota Denpasar. Disebutkan dalam draft konsep *Urban Village* tersebut, tujuan dari perancangan itu ialah dapat menjadikan kawasan desa lestari dengan tatanan pariwisata budaya yang nantinya diharapkan sebagai salah satu bagian dari daerah tujuan wisata dengan rencana pengembangan Kota Madya Denpasar, kemudian sasaran fisiknya ialah membenahi lingkungan alam (sawah), perumahan fasilitas umum dan sebagainya, sedangkan sasaran non fisik ialah sumber daya masyarakat, adat istiadat serta pengembangan nilai tradisi yang ada.¹¹

Pada draft tentang *Urban Village* diatur mengenai konsep dan bentuk perumahan. Masalah akan timbul jika fenomena budaya dibaca sebagai sesuatu yang rigid, tanpa ada ruang dialog didalamnya, bagaimana nasib budaya ini jika harus berhadapan dengan keniscayaan peradaban, atau globalisasi. Dimana Pada titik itu arus deras informasi tidak dapat dibendung, dan kontak/diaolog antar budaya menjadi tidak dapat dihindari. Artinya kita melihat budaya yang bergulat dengan fenomena-fenomena kebudayaan lainnya, dengan produk kreasi manusia yang saling berdialektika dan mengisi secara *take and give*. Sehingga dalam proses tersebut kita tidak lagi berhadapan dengan budaya yang rigid, monolog dan berwajah “seram”. Melainkan menjadi bagian dari proses-proses yang manusiawi, dialogis, dan elastis. Dalam kondisi seperti itu budaya bukan barang antik yang tersimpan berdebu di museum atau seperti barang antik yang dipajang di sepanjang Jl. By Pass Ngurah Rai yang sengaja dibikin “antik”

Dialektika budaya seperti yang disebutkan tadi, sebenarnya sudah terjadi dalam tradisi dan budaya di Bali. Patra Cina, Patra Wolanda, Patra Kutamesir dan masih banyak lagi, membuktikan bahwa dialog antar budaya pernah terjadi dan berhasil. Lalu mengapa institusi seperti Laboratorium Arsitektur (terkesan) ingin menyeragamakan ekspresi budaya di dalam masyarakat Bali yang sebenarnya tanpa diseragamkan-pun sudah

¹¹ Laboratorium Perumahan dan Pemukiman P.S. Arsitektur Unud, *Draft, Konsep Kawasan Penatih Lestari*, Denpasar, 1999

menunjukkan homogenitasnya. Seorang teman pernah khawatir, suatu hari nanti ia – yang orang Bali asli – bisa dianggap bersalah karena mencoba membangun rumah yang “nyleneh” atau dengan cara yang “tidak Bali”.

Paska Kolonialisme – Kolonialisme Baru

Begitu pula yang terjadi dengan alat produksi kebudayaan yang lainnya. Seperti media massa, galeri, studio seni, buku-buku panduan pariwisata, internet, dan masih banyak lagi. Mereka inilah yang bersama-sama membombardir dan menciptakan sebuah realitas baru demi kepentingan turistik. Sebuah realitas yang sejak dahulu diinginkan oleh *Bali Instituut* dengan praktek disiplin *Baliseering*-nya. Sebuah dunia yang sengaja diciptakan demi turisme, yang mungkin bisa dibandingkan dengan *Disney World Company*-nya Jean Baudrillard. Sebuah galaksi simulacra tercipta di Bali. Dimana kenyataan dan impian, murni dan palsu, asli dan imitasi saling tumpang tindih.

Parahnya lagi, tidak banyak masyarakat Bali yang tahu bahwa kolonialisme baru telah mendarat di pulau ini. Bank Dunia – sebagai salah satu agen kapitalisme dunia – tiba-tiba tergepoh-gepoh turun tangan “menyelamatkan” Bali, yang menurut mereka mulai “tercemar”. Seperti juga *Bali Instituut* dengan *Baliseering*-nya. Bank Dunia datang dengan proyek megah berjudul “Kebijakan dan Strategi untuk Warisan Budaya Bali”. Sebuah kontrak yang akan menjerat Bali untuk sekian dekade yang akan datang@